

BAB II

KONDISI SOSIAL-POLITIK INDONESIA PADA TAHUN 1942-1945

A. Kondisi Umat Islam Pada Masa Awal Kedatangan Jepang

Sejak Belanda menginjakkan kakinya sampai pada masa-masa akhir penjajahan, Nusantara telah di tandai dengan timbulnya berbagai macam kerusuhan, pemberontakan, serta kegelisahan sosial yang mengganggu jalannya roda pemerintahan Belanda di Indonesia. Keadaan ini dapat dimengerti, karena bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang sejak berpuluh-puluh abad lamanya hampir tidak pernah mengalami penderitaan dan tekanan.²⁶ Sehingga mereka merasa jemu dan muak dengan penjajah, yang mereka tunjukkan dengan berbagai pemberontakan. Keadaan yang sedemikian ini terjadi karena umat Islam tidak dapat lagi memberikan toleransi kepada para penjajah, perjuangan umat Islam yang ada saat itu ditujukan untuk mengusir penjajah.²⁷

Sekitar tahun 1940-an, ketika Belanda menyatakan perang dengan Jepang pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan Perekrutan orang-orang untuk dijadikan serdadu-serdadu atau wajib militer. Atau disebut *milisi*.²⁸ Hal ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan membantu menjaga

²⁶Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugraha Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, Hlm. 187.

²⁷Deliar Noer, *Islam dan Politik di Indonesia dalam Prisma*, LP3ES, Jakarta, 2000, Hlm. 3.

²⁸Lathiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Intelektual : Biografi K.H Hasyim Asy'ari*, Lkis, Yogyakarta, 2000, Hlm. 94.

pemerintah Hindia-Belanda agar tidak jatuh ketangan tentara Jepang. Sebelum pembentukan milisi tersebut berhasil, umat Islam lewat *Majlis Islam A'la Indonesia* yang biasa disebut MIAI. Mengeluarkan semacam kesepakatan bersama dengan “mengharamkan” umat Islam bergabung didalamnya. Hal ini dikarenakan, bilamana ditinjau dari segi hukum Islam tentang hukum mati dalam peperangan, seorang bisa dihukumi mati syahid apabila ia mati karena membela agama, harta benda, membela kemerdekaan dan membela kehormatan. Namun apabila hal ini dilihat dari kondisi saat itu, perang terjadi antara Belanda dengan Jepang yang sama-sama sebagai penjajah. Maka apabila kita mati dalam peperangan tersebut, hukumnya adalah mati sia-sia.²⁹

Sebelum Jepang menguasai wilayah Indonesia, ia telah mengeluarkan pengaruhnya pada bangsa Indonesia dengan menarik simpati yang sedalam-dalamnya dengan mengadakan kongres al-Islam di Jepang dan merespon perkembangan agama Islam yang terjadi di negara matahari terbit tersebut, kontan perhatian umat Islam yang selama ini berada di Timur Tengah, akhirnya tertuju pada negara matahari terbit. Sedangkan propaganda yang dilakukan di dalam masyarakat Indonesia dilakukan dengan cara menyusupkan orang-orang kepercayaan Jepang dalam perdangan, yang kemudian para pedagang tersebut sedikit demi sedikit menarik simpati masyarakat Indonesia dengan mengatakan akan datang saudara tua bangsa Indonesia yang akan membebaskan dari penjajahan

²⁹Syaifudin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Lkis, Bandung, 2012, Hlm 146

Barat. Propaganda-propaganda tersebut sedikit demi sedikit merasuki jiwa dan pikiran bangsa Indonesia mulai saat itulah diam-diam menantikan kedatangan bangsa kulit putih tersebut dengan suka cita.³⁰

Beberapa hari menjelang pendaratannya di Indonesia radio Tokyo berkoar-koar menyiarkan bahwa mereka akan datang membebaskan bangsa Indonesia dari Belanda serta akan menghormati dan menjunjung tinggi agama Islam. Pesawat-pesawat udara Jepang pun menyebarkan pamlet-pamlet yang bunyinya sama serta menggambarkan pertemuan antara bangsa Indonesia dengan tentara Jepang dalam suasana yang bersahabat, serta dikibarkannya bendera merah putih dan bendera Jepang yang sejajar.³¹

Kedatangan Jepang pada umumnya disambut dengan penuh semangat. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jepang makin di senangi dengan mengizinkan dikibarkannya bendera Indonesia, merah-putih dan dikumandangkannya lagu Indonesia raya sebagai lagu kebangsaan. Dua hal tersebut yang dilarang pada masa penjajahan Belanda.³²

Pendudukan Jepang yang dimulai bulan Februari 1942 sangat menentukan kehidupan umat Islam yang menerima dengan penuh harapan,

³⁰*Ibid.*

³¹Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun; Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945*, diterjemahkan. Daniel Dakhidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980, Hlm. 138.

³²George MC Turnan Kahin, *Nasionalism And Revolution in Indonesia*, diterjemahkan Bakdi Soemanto, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik; Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 1995, Hlm. 130.

terutama janji kemerdekaan yang di janjikan kepada negara-negara yang dikuasainya.³³

Sehari setelah penyerahan pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Jepang, pemerintah Jepang lewat Imamura segera melarang seluruh Bentuk organisai dan pertemuan-pertemuan. Pada tanggal 26 november 1942 Jepang secara resmi melarang segala kegiatan politik termasuk rapat-rapat yang membicarakan masalah organisasi dan bentuk struktur pemerintahan. Kemudian Jepang menggalang kekuatan politik dan membentuk gerakan 3 A. Gerakan tiga A sendiri memiliki 3 arti, yakni Jepang pelindung Asia, jepang Pemimpin Asia dan Jepang cahaya Asia. berdiri pada tanggal 1 Juli 1942, diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Pada awal gerakan tiga A dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tuanya ini dapat mencium aroma kemerdekaan. Maka dari itu Jepang menggalang masa guna perjuangan melawan sekutu yang deketuai oleh Syamsudin dari golongan Nasionalis.³⁴

Propaganda Jepang atas gerakan 3 A tidak mendapatkan sambutan yang berarti dari masyarakat Indonesia, hal ini terjadi karena dalam gerakan 3 A Jepang mementingkan perang melawan sekutu serta menghisap ekonomi untuk kepentingannya, tolak ukurnya, Dari sinilah bangsa Indonesia paham bahwa kemakmursmisan ekonomi bagi Indonesia atas Nusantara yang telah dijanjikan dinomorduakan dan bahkan bahkan hal itu tidak

³³Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Lkis, Yogyakarta, 1999, Hlm 28.

³⁴<http://www.katailmu.com/2011/04/gerakan-tiga-organisasi-bentukan-jepang.html>

pernah terlintas dalam pikiran dan hati pemerintah Jepang. Bahkan seluruh bahan makanan, kina, minyak, dan rempah-rempah dikuras habis dan dibawa ke negara Jepang untuk kepentingan perangnya. Akan tetapi Jepang menghentikan seluruh impor bahan pakaian dan onderdil ke Indonesia. Selain itu, Jepang juga mengawasi kurikulum di sekolah-sekolah secara kasar serta memanfaatkan tangan besinya dan memaksakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda di sekolah-sekolah menengah keatas dan menjadikan sebagai bahasa resmi pemerintah.³⁵

Pada masa awal pendudukannya, Jepang berusaha menjadikan Indonesia seperti daerah jajahannya terdahulu, dengan mengubah seluruh tatanan budaya yang ada. Kebudayaan Jepang yang sangat ditentang oleh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah pemberlakuan bentuk penghormatan kepada kaisar Tenno Heika dengan cara membungkukkan badan menyerupai ruku'dalam solat yang dilakukan tiap pagi atau disebut *Saikerei*.³⁶ Karena sebagian besar umat Islam menganggap bahwa hal itu sebagai bentuk penyembahan terhadap seseorang sehingga dipandang sebagai sesuatu hal yang menyebabkan dosa besar (syirik). Ketika pemberlakuan saikerei dimulai banyak terjadi penangkapan terhadap tokoh umat Islam antara lain K. H. Hasyim Asy'ari dan K. H. Mahfoed Siddiq, dan beberapa ulama di Jawa Barat dan Jawa Tengah. K. H. Hasyim Asy'ari adalah pemimpin pondok pesantren Tebuireng Jombang Jawa

³⁵George McTunan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok, 2013, Hlm. 132.

³⁶<http://ensiklo.com/2014/10/seikerei-adalah-penghormatan-dengan-cara-membungkukkan-badan-mengarah-matahari-terbit/>

Timur dan K. H. Mahfoed Shiddiq selaku pengurus Nahdhotul Ulama kota Surabaya.³⁷

Alasan uang digunakan oleh Jepang untuk menangkap kedua tokoh tersebut adalah tuduhan Jepang bahwa mereka telah mendalangi kerusuhan yang terjadi di pabrik gula di Cukir Jombang dekat pondok pesantrennya. Alasan ini terkesan dibuat-buat oleh pemerintah Jepang. Permasalahan yang sebenarnya adalah berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh K. H. Hasyim Asy'ari mengenai pengharaman menjalankan *saikerei* bagi umat Islam, karena telah dianggap menyekutukan Allah.³⁸

Berita ditangkapnya kedua tokoh tersebut cepat tersebar dan menguncang seluruh pondok pesantren di Jawa. Pada tanggal 1 Agustus 1942 umat Islam lewat pondok pesantren telah berhasil mengumpulkan para pemimpin umat Islam untuk menyikapi keadaan yang menimpa kedua tokoh NU tersebut. Berkumpunya para Ulama dan menghasilkan suatu keputusan agar mereka bersedia dipenjara menggantikan kedua tokoh tersebut.³⁹ Kejadian ini menjadi tamparan yang hebat bagi pemerintah Jepang.

Ketika Jepang mengetahui kekuatan Umat Islam yang sedemikian besar, akhirnya Jepang mengeluarkan K. H. Hasyim Asy'ari dan K. H. Mahfoed Siddiq dari penjara. Dari sinilah akhirnya Jepang mulai melonggar kewajiban *saikerei* terhadap umat Islam dan mulai berusaha

³⁷Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhotul Ulama*, Jatayu, Solo, 1985, Hlm. 114.

³⁸Lathiful Khuluk, Op. Cit, Hlm. 114.

³⁹Choirul Anam, *Loc. Cit.*

menjalin hubungan baik yang dengan bangsa Indonesia khususnya umat Islam, kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang antara lain, pertama, dengan menangkap K. H. Hasyim Asy'ari dan K. H. Mahfoed Siddiq. Kedua, pada awal pendudukannya di Indonesia Jepang telah mengeluarkan keputusan untuk menutup seluruh pondok pesantren yang ada di daerah-daerah, dan terakhir adalah dengan membubarkan seluruh kegiatan politik dan sosial keagamaan⁴⁰ dengan mendirikan organisasi yang dapat menampung dan mewartakan kekuatan Islam.

Masa pendudukan Jepang yang sangat singkat yakni tahun 1942-1945 atau hanya kurang lebih 3 tahun telah menimbulkan kesan yang traumatis bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu dikarenakan, pemerintah yang dijalankan oleh Jepang bersifat diktator. Hal ini menyebabkan banyak hak-hak kemanusiaan rakyat yang dihapuskan, kelemahan ekonomi Jepang menghadapi sekutu menimbulkan kelaparan dan tewasnya sejumlah penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, pemaksaan orang-orang untuk menjadi pekerja keperluan perang sampai ke pelosok Asia serta pemerkosaan terhadap wanita-wanita Indonesia yang seharusnya menjadi tenaga sukarela perang (palang merah) oleh para tentara Jepang sebagai pemuas nafsu birahinya. Keadaan yang demikian ini menimpa seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali umat Islam pun terkena imbas pada waktu itu. Sedangkan bagi umat Islam Indonesai, bala tentara dari Nippon selain membawa penderitaan

⁴⁰Deliar Noer, *Partai Islam di pentas Nasional 1945-1965*, Grafin Press, Jakarta, 1987, Hlm. 25-26.

sebagaimana juga yang dialami oleh golongan lain seperti halnya kelaparan, tidak adanya bahan pakaian kepedihan karena kehilangan saudara. Namun disisi lain dari pendudukan Jepang adalah terjadinya perubahan dalam peranan politik umat Islam, dengan bangkitnya kepercayaan Jepang terhadap para pemimpin Islam, hal ini mengakhiri kekerasan kaum priyayi yang selama ini menjadi *back-up* pemerintah Belanda. Maka dengan demikian organisasi Islam dengan umat Islam menjadi suatu kekuatan politik *Par Excellence* dan menjadi saingan bagi gerakan nasionalis non religius dan golongan priyayi.⁴¹

B. Kebijakan Politik Jepang Terhadap Umat Islam

Jauh sebelum Jepang menduduki wilayah Indonesia, Jepang sudah berusaha menyelidiki dan mempelajari keadaan masyarakat Indonesia dengan maksud ingin mengetahui kekuatan dan potensi bangsa yang sebenarnya. Karena Jepang sudah sadar bahwa bangsa yang kurang lebih tiga setengah abad dijajah oleh Belanda, ternyata tidak pernah mau tunduk dibawah kekuasaannya.

Setelah Jepang mengetahui potensi bangsa Indonesia yang terletak pada umat Islam dimana mereka tidak pernah mau tunduk dengan para penguasa kafir. Para tentara Jepang berusaha sebaik mungkin mendekati umat Islam dengan cara mendirikan lembaga-lembaga keislaman dan

⁴¹Harry J. Benda, *Op. Cit*, Hlm. 140.

mencetak majalah-majalah yang mengangkat semua permasalahan yang ada kaitannya dengan agama Islam.

1. **Mobilisasi Ulama di Tingkat Pedesaan**

Sudah penulis terangkan diatas, bahwa pada tahun-tahun sebelum Jepang menguasai Indonesia, Jepang sudah berusaha menyelidiki dan mempelajari keadaan masyarakat Indonesia dengan maksud ingin mengetahui potensi dan kekuatan bangsa yang sebenarnya, karena Jepang sadar bahwa bangsa yang selama berabad-abad dijajah oleh pemerintah Belanda, tidak mau tunduk di bawah pengaruh kekuasaannya.⁴²

Setelah diadakan penyelidikan, Jepang akhirnya memahami bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, mereka tidak mau tunduk kepada pemerintah Barat yang kafir. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan Jepang yakni dengan mendekati kaum muslimin terutama diarahkan kepada para pemimpin Umat Islam yang tinggal di pedesaan. Kebijakan yang diambil tersebut dinamakan “*Nippon’s Islamic Grass Root Policy*”.⁴³

Dalam menghadapi umat Islam, Jepang sebenarnya mempunyai kebijakan politik yang sama dengan pemerintah Belanda. Hanya saja pada awal pendudukannya Jepang lebih bersikap bersahabat. Hal ini dilakukan, karena Jepang mempunyai pendirian bahwa umat Islam Indonesia, khususnya ulama desa dengan yang laten merupakan

⁴²Umar Hasyim, *Mencari Ulama Pewaris Ilmu*, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, Hlm. 232.

⁴³Ahmad Mansyur Suryanegara, *Wacana Pergerakan Islam Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998, Hlm. 259.

powerful Forces. Dalam menghadapi tentara sekutu. Sedangkan latar belakang umat Islam yang anti Imperialis memiliki kesamaan tujuan dengan perang Asia Timur Raya yang sedang dikobarkan tentara Jepang. Sikap umat Islam yang sedemikian tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial.⁴⁴

Untuk menjalankan missinya, Jepang memilih para Ulama desa sebagai perpanjangan kekuasaannya. Ini disebabkan karena para ulama desa berada jauh dari analisa politik yang jumlahnya hampir 80% dari seluruh ulama yang ada di Indonesia. Jepang menginginkan adanya pemisahan antara umat Islam dan politik.⁴⁵ Jepang tidak mentolelir perkawinan yang tidak halal antar Islam dan politik. Jepang menyadari bahwa sikap politik umat Islam tidak pernah damai dengan penjajahan Barat.⁴⁶

Untuk menyempurnakan tugas para ulama kyai menjadi propagandis. Jepang merasa perlu mengeluarkan guru-guru yang berada di desa-desa yang terisolasi dalam dunia rohani. Pemerintah Jepang lewat Gunseikan memberikan pengakuan terhadap ulama sebagai faktor utama didalam masyarakat Indonesia, pada bulan Desember 1942. Dalam rerepsi pertemuan yang diadakan di Jakarta tersebut dihadiri 32 ulama Jawa dan Maura. Diantaranya termasuk K. H. Hasyim Asyari, K. H. Mahfoed Siddiq dan K. H. Abdul Wahid Hasyim dan Jepang mengumumkan tugas-tugas kepada para ulama.

⁴⁴*Ibid*, Hlm. 139

⁴⁵Harry J. Benda, *Op. Cit*, Hlm. 142.

⁴⁶Umar Hasyim, *Op, Cit*, Hlm. 232

Pada saat ini tugas yang terpenting adlah bahwa saudara-saudar (ulama) menyelami sedalam-dalamnya saripati kebudayaan Nippon dan mulai mengenal keadaan negeri tersebut, bila saudar-saudara dilengkapi dengan pengetahuan ini saudara harus mendidik kaum muda dan menjadikannya bersedia bekerja bagi Asia Timur Raya.⁴⁷

Setelah Gunseikan mengumumkan kebijakan-kebijakan Jepang terhadap umat Islam yang ada dipedesaan, dan akan menjadikan para guru adama tersebut sebagai pemimpin front sipil yang bertugas menjamin keamanan dan kesiagaan rakyat. Maka lewat kantor urusan agama (*Shumubu*) Kolonel Horie dan asisten-asitenya melakukan perjalanan keliling Jawa serta mengadakan konferensi-konferensi dengan para Kyai setempat.

Untuk mengawali usahanya, pada awal Mei 1943 Jepang lewat shumubu mengundang para kyai se-Jawa untuk menjalankan massa latihan di Jakarta. Kelompok pertama terdiri dari 60 orang ulama dan kyai. Mereka dipilih dari setiap karisedanan (*Shu*) Jakarta dan Empat kota besar (*Kochi*) di Jawa Tengah. Latihan ini diberi nama “*Latihan Kyai*” yang mempunyai tujuan untuk memperluas kursus-kursus ini secara tidak terbatas serta memberikan dosis “Semangat Baru”.

Dua bulan sebelum kursus dimulai pemerintah Jepang mengadakan konferensi pendahuluan antara pengurus-pengurus *shumubu* dengan pemimpin-pemimpin yang dilakukan di hotel Des

⁴⁷Harri J. Benda, *Op, Cit* , Hlm. 165-166

Indes Jakarta. Pada kesempatan itu para pemimpin Islam meminta kepada pemerintah Jepang agar MIAI dihidupkan kembali.

Latihan Kyai ini mempunyai relenvansi dengan masalah pendidikan khususnya pendidikan Islam. Karena dalam hal ini Jepang mendapat kesulitan dalam mengawasi pendidikan Islam di Jawa, baik yang teroganisir maupun yang tidak teroganisir. Maka dengan begitu Jepang akan lebih mudah menyusun kurikulum untuk diterapkan di sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah madrasah. Dalam kurikulum barunya bahasa Jepang dijadikan sebagai mata pelajaran pokok dan madrasah-madrasah pemakaian buku teks arab harus seizin shumubu.⁴⁸

Upaya Jepang terus dilakukan secara ketat, dalam upaya untuk mencegah pengaruh Arab, sekolah-sekolah yang memakai bahasa Arab sebagai bahasa penganatarnya tidak di ijinakan untuk dibuka kembali. Bahkan bahasa Arab tidak boleh diajarkan meskipun di dalam pendidikan pesantren. Pelarangan atas belajar bahasa Arab sama halnya dengan dilarangnya belajar membaca Al-Qur'an. Karena tekanan yang amat keras dari umat Islam, akhirnya Jepang berusaha menarik kembali kebijaksanaan tersebut dan bersamaan dengan penarikan kebijakan itu, Jepang sedikit demi sedikit berusaha menghapsukan kewajiban untuk melakukan *saikerei* bagi umat Islam.

⁴⁸Nouruzzaman Siddiqi, *Meenguk Sejarah Muslim*, Yayasan Ppusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Jakarta, 1984, Hlm. 26-27.

Mobilisasi Ulama sampai ke tingkat yang paling bawah adalah merupakan aspek terpenting dari kebijakan politik Jepang terhadap umat Islam. Namun hal ini bukanlah satu-satunya aspek dari politik Jepang. Karena sejak pertengahan 1943 umat Islam baik dari golongan Muhammadiyah maupun NU, melalui tokoh-tokohnya sudah terlibat langsung dalam pertahanan militer.⁴⁹ Akan tetapi keterlibatannya tersebut tidak berarti Jepang hendak memberikan keluasaan dan kelonggaran aksi politik Islam, melainkan Jepang berusaha untuk mempersiapkan pulau Jawa sebagai pusat pertahanannya.⁵⁰

2. Membentuk Organisasi Baru

Sebagaimana kita ketahui untuk melaksanakan tujuannya diatas, Jepang membutuhkan satu organisasi Muslim yang menyeluruh yang dapat mengimpun seluruh umat Islam Indonesia baik yang beraliran modern maupun yang beraliran tradisional. Organisasi tersebut harus dibentuk Jepang dan sepenuhnya berada dibawah kontrol mereka. Hal ini terlihat jelas bagaimana semangat Jepang untuk mendorong dan memberi prioritas utama bagi terbentuknya organisasi Islam yang menyeluruh.⁵¹

Setelah Jepang mengetahui kekuatan dan potensi bangsa Indonesia, maka pada minggu-minggu pertama masa pendudukannya, Jepang mendirikan kantor. Urusan Agama (*Shumubu*) yang diketuai

⁴⁹Harri J. Benda, *Op, Cit*, Hlm. 160.

⁵⁰*Ibid*, Hlm. 169.

⁵¹Nouruzzaman Shiddiqi, *Op, Cit*, hlm. 49.

oleh Kolonel Flone.⁵² *Shumubu* bukanlah organisasi yang dibuat untuk kepentingan umat Islam maupun bangsa Indonesia, namun pembentukannya semata-mata untuk dijadikan alat untuk mendekati masyarakat Indonesia atau sebagai media propaganda kebijaksanaan Jepang dalam membentuk organisasi mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai paku untuk memperkuat sentimen kebangsaan dan keagamaan dalam masyarakat guna kepentingan Jepang. Sedangkan kedua, dalam waktu yang bersamaan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap sentimen mereka. Disini dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan Jepang mendirikan organisasi yang menghimpun seluruh umat Islam adalah sebagai media untuk kekuatan massa dalam mengintroduksi ide dan cita-cita mereka dan dapat digunakan sebagai alat yang dapat dengan mudah untuk diarahkan sekendak Jepang.⁵³

Ketika MIAI dihidupkan kembali oleh umat Islam, oleh pemerintah Jepang dianggap tidak memenuhi harapannya. Hal itu dikarenakan tidak ikut bergabungnya dua organisasi sosial keagamaan, yaitu NU dan Muhammadiyah. Karena itu, Jepang beranggapan bahwa sebuah organisasi yang tidak didukung oleh dua element tersebut maka hasil yang dihasilkan tidak akan mampu untuk menarik dan mempengaruhi simpati massa.

Karena MIAI dianggap tidak pernah pro dengan Jepang, justru menjadi kekuatan umat Islam, maka Jepang membubarkan MIAI yang

⁵²Harri J. Benda, *Op, Cit* , Hlm. 168.

⁵³Nouruzzaman Shiddiqi, *Op, Cit*, hlm. 45.

kemudian menjadi Masyumi (*Majlis Syuro Muslimin Indonesia*) suatu yang menyeluruh dari organisasi-organisasi Islam yang mengibarkan perang jihad melawan sekutu dibawah kepemimpinan Jepang.⁵⁴

Didirikannya organisasi Masyumi yang diberi status hukum sejak pendirinya merupakan sebuah kemenangan politik Jepang terhadap umat Islam. Sumbu telah berhasil menghilangkan bayangan federasi “antikolonial” sebagai gantinya tampil sebuah organisasi yang tidak terlalu swasta, yang tidak hanya mewakili kelompok-kelompok Indonesia dan Arab. Sistem keanggotaan dalam Masyumi hanyalah terbuka bagi perserikatan-perserikatan yang diberi status hukum oleh pemerintah militer.⁵⁵ Dari sejak berdirinya organisasi ini memang ditujukan untuk NU dan Muhammadiyah yang dianggap dapat memenangkan dukungan massa ditingkat masyarakat bawah, serta para pengurusnya dari keduanya dengan pucuk pimpinan. K.H. Hasyim Asy’ari, seorang tokoh kharismatik NU.

C. Implikasi Kebijakan Politik Jepang Terhadap Umat Islam.

Runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda dalam waktu yang relatif singkat, telah menimbulkan rasa kagum dalam kalbu bangsa Indonesia terhadap keperkasaan tentara Jepang kejadian itu telah meningkatkan harapan bangsa bahwa tidak lama lagi “Indonesia akan merdeka” akan menjadi kenyataan seperti janji yang disebarluaskan lewat radio-radio

⁵⁴John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern Jilid IV*, Mizan, Bandung, 2001, Hlm. 122.

⁵⁵Lathiful Khuluk, Op. Cit, Hlm. 101.

Tokyo yang berbunyi bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah jajahannya.

Pendudukan Jepang yang hanya seumur jagung telah membawa perubahan melalui kebijakan politik yang telah diterapkan oleh pemerintah Jepang. Dampak yang ditimbulkan kebijakan politik Jepang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Pertama, sisi negatif yakni pada masa awal pendudukannya Jepang lewat jendral Imamura telah mengeluarkan kebijakan politik yang bersifat menekan bangsa Indonesia termasuk larangan terhadap organisasi sosial keagamaan dan segala bentuk kegiatan politik juga terjadi pelarangan menyanyikan lagu Indonesia raya dan pengibaran bendera merah putih serta menekan keberlangsungan hidup media massa Indonesia kehidupan tersebut terjadi pada hari-hari pertama pendartannya di Indonesia secara spontan bangsa Indonesia menarik dukungan dan sambutan yang telah diberikan. Akhirnya lambat laun dukungan tersebut menghilang begitu saja. Dengan adanya kebijakan tersebut bangsa Indonesia semakin membenci pemerintahan Jepang dan mereka beranggapan Jepang sama halnya dengan pemerintah kolonial Belanda.⁵⁶

Ketidakpercayaan dan kebencian umat Islam semakin menjadi-jadi, ketika Jepang mengumunkan satu kebijakan yang sangat menyinggung keberadaan umat Islam yakni dengan diberlakukannya kewajiban menjalankan *saikerei* (menghormat ke arah istana Tenno Haika di Tokyo

⁵⁶<http://sejarah11-jt.blogspot.co.id/2013/09/reaksi-perlawanan-rakyat-indonesia-terhadap-penjajahan-jepang.html>

yang sikap seperti ruku). Kewajiban Saekerei ini sangat di tentang oleh umat Islam Indonesia, karena hal tersebut telah dianggap melecehkan aqidah yang dianut umat Islam, sehingga perlawanan terhadap kewajiban menjalankan *saikerei* terjadi dimana-mana.

Ketika pemerintah Jepang menyadari bahwa mereka tidak bisa merasakan dukungan yang mereka dapatkan seperti pada masa awal pendudukannya. Dan saat itulah menyadari potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam, kemudian mereka mulai menerapkan kebijakan *Nippon's Grass Root Policy*.⁵⁷

Sedangkan sisi positif dari kebijakan Jepang di Indonesia adalah mulai saat itu umat Islam menjadi bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini dikarenakan umat Islam khususnya NU mempunyai kekuatan tawar yang tinggi dihadapan para penguasa dan para pemimpin nasionalis sekuler. Maka dari penerapan kebijakan *grass root policy*, umat Islam telah mendapatkan keuntungan yang banyak seperti didirikannya organisasi-organisasi sosial-keagamaan antara lain, pendirian Shumubu (kantor urusan agama) yang telah menggantikan *Kantor Voor Het Inlandsche Zaken* yang sudah ada pada masa pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pembentukan Masyumi (Majlis Islam A'la Indonesia) dan yang paling signifikan adalah pembentukan tentara Hisbullah. Pada masa pendudukan Jepang ini, umat Islam telah mempunyai kedudukan penting dalam organisasi-organisasi yang ada. Hal ini sangat

⁵⁷Harry J. Benda, *Op. Cit*, Hlm 143.

menggembirakan dan menjadi tonggak awal kebangkitan umat Islam khususnya NU sebagai *jam'iyah diniyah* setelah bertahun-tahun tidak mendapatkan tempat untuk mengekspresikan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁸

Keberadaan NU dan posisinya didapatkan dalam dimensi politis, pada masa pendudukan Jepang bukanlah awal keterlibatan NU dalam kancan politik praktis karena sebelumnya NU juga terlibat aktif dalam setiap kegiatan MIAI (yang didirikan pada tahun 1937), serta bernama GAPI menuntut kepada pemerintah hindia-belanda menuntut indonesia berparlemen. NU juga pernah bergabung dengan Masyumi yang dibentuk setelah kemerdekaan dan ikut aktif didalamnya sampai ia menyatakan diri keluar dari Masyumi dan mendeklarasikan pembentukan partai sendiri. Maka dari awal kelahiran NU sudah mempunyai *ghirah* dalam dimensi politik yang sangat besar dengan dikirimkannya delegasi untuk menemui Raja Saud di Makkah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa NU sebagai gerakan sosial keagamaan, menjadi partai baru pada tahun 1952, akan tetapi sejak berdiri NU tidak bisa melepaskan diri dari dimensi politik.

⁵⁸Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*, Lkis, Yogyakarta, 2004, Hlm .31.